



## PERAN SIIP DALAM MENINGKATKAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PERADILAN DI PN LBB

Dinda Fadhila , Riki Zulfiko

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Email:  
[Dindafadhila03@gmail.com](mailto:Dindafadhila03@gmail.com) , [rikiabumufid@gmail.com](mailto:rikiabumufid@gmail.com)

### Abstract

*This article discusses the application of case investigation information (SIIP) at the Lubuk Basung District Court in this article as a result of the rapid development of technology and information. One of the most significant impacts of this development is that the field of archiving carried out in the courts is very helpful and makes it very easy for employees and judges to access data. The (SIIP) system includes a List of Case Archives, which can be accessed by all courts in Indonesia. This service is carried out through participation, where students participate in work related to the use of (SIIP). The aim of this research is to evaluate the implementation of (SIIP) Courts in Indonesia, with an emphasis on performance, weaknesses, and suggestions for improvement. According to research results, (SIIP) Court succeeded in increasing the efficiency of the judicial process by 40% and improving the quality of service. However, lack of technological infrastructure and data security issues remain problems. One of the strategic steps to improve the quality of judicial services in Indonesia is to implement the Court (SIIP). To overcome existing limitations and increase the effectiveness of administering justice, improvements and development of this system are needed. The recommendations of this research can be used as a reference for future development of the Court's SIIP.*

**Keywords:** justice administration information system, effectiveness, transparency.

### Abstrak

*Artikel ini membahas tentang aplikasi informasi penelusuran perkara (SIIP) di Pengadilan Negeri Lubuk Basung di dalam artikel ini sebagai akibat dari perkembangan pesat teknologi dan informasi. Salah satu dampak yang paling signifikan dari perkembangan ini adalah bidang pengarsipan yang dilakukan di dalam pengadilan sangat membantu dan sangat memudahkan karyawan dan jajaran hakim dalam mengakses data . Sistem (SIIP) ini mencakup Daftar Arsip Perkara, yang dapat diakses oleh semua pengadilan di Indonesia. Pengabdian ini dilakukan melalui partisipasi, di mana mahasiswa berpartisipasi dalam pekerjaan yang berkaitan dengan penggunaan (SIIP). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan SIIP Pengadilan di Indonesia, dengan penekanan pada kinerja, kelemahan, dan saran untuk perbaikan. Menurut hasil penelitian, (SIIP) Pengadilan berhasil meningkatkan efisiensi proses peradilan sebesar 40% dan meningkatkan kualitas pelayanan. Namun, kekurangan infrastruktur teknologi dan masalah keamanan data tetap menjadi masalah. Salah satu*

*langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan peradilan di Indonesia adalah menerapkan (SIIP) Pengadilan. Untuk mengatasi keterbatasan yang ada dan meningkatkan efektivitas penyelenggaraan peradilan, diperlukan perbaikan dan pengembangan sistem ini. Rekomendasi penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk pengembangan (SIIP) Pengadilan di masa mendatang.*

**Kata Kunci:** *system informasi penyelenggaraan peradilan, Efektivitas, Transparansi.*

## A. PENDAHULUAN

Pengadilan Negeri sebagai lembaga peradilan tingkat pertama memiliki peran penting dalam menegakkan keadilan dan melindungi hak-hak warga Negara.<sup>1</sup> Namun, proses peradilan yang kompleks dan memerlukan waktu lama seringkali menimbulkan kekecewaan bagi masyarakat.<sup>2</sup> Pada Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ayat (1) menyatakan bahwa "Kekuasaan Kehakiman merupakan suatu kekuasaan yang disebut merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan", dan ayat (2) menyatakan bahwa "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha neg Pengadilan berfungsi sebagai solusi bagi mereka yang mencari keadilan. Sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan, Pengadilan Negeri berada di Ibukota Kabupaten/Kota dan daerah hukumnya mencakup wilayah tersebut.

Sebagai institusi, lembaga pengadilan tidak dapat terlepas dari factor manusianya, hakim, panitera, serta faktor jurusita dan lain-lain (Basarah, 2007). Pimpinan pengadilan memiliki tanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas pokok pengadilan tersebut dengan dibantu oleh para hakim, kepaniteraan dan kesekretariatan. umum, kepaniteraan mempunyai tugas pokok dan fungsi membantu pimpinan pengadilan dalam menyelenggarakan sebagian tugas pokok dan fungsinya. Tugas kepaniteraan pada pengadilan tingkat pertama diantaranya adalah menyelenggarakan fungsi pelayanan administrasi perkara, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan persidangan, pelaksanaan urusan administrasi perkara, administrasi keuangan perkara dan tugas administrasi lainnya yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Undang-Undang; dan penyusunan statistik, dokumentasi, laporan serta pengarsipan perkara.

---

<sup>1</sup> Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>2</sup> Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2019 tentang Prosedur Penyelesaian Kasus.

Berkembangnya teknologi dan informasi yang pesat berdampak signifikan, salah satunya di dalam bidang pengarsipan. Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk penyelenggaraan peradilan. Sistem Informasi Penyelenggaraan Peradilan (SIIP) merupakan contoh inovasi teknologi yang bertujuan meningkatkan efisiensi dan transparansi peradilan. Penggunaan internet, komputer serta berbagai media digital pada hampir seluruh kegiatan organisasi menyebabkan terjadi peralihan dari tradisi arsip yang mulanya berbasis kertas menjadi arsip elektronik. Di dalam kegiatan perkantoran setiap harinya tidak jauh-jauh dari penggunaan aplikasi elektronik, email, website, hingga dokumen yang dipindai (scan).

Sistem elektronik menawarkan kemudahan yang membuat banyak individu hingga organisasi lebih memilih untuk menyimpan arsip dalam bentuk digital. Akan tetapi, dalam menggunakan sistem elektronik untuk kerja administratif dibutuhkan upaya yang lebih. Sistem elektronik menawarkan kemudahan yang membuat banyak individu hingga organisasi lebih memilih untuk menyimpan arsip dalam bentuk digital. Akan tetapi, dalam menggunakan sistem elektronik untuk kerja administratif dibutuhkan upaya yang lebih besar semenjak sistem ini mensyaratkan berkas digital (digital file) untuk memudahkan pergerakan arsip. Oleh karena itu, saat ini banyak organisasi yang mulai mengembangkan sistem elektronik yang difungsikan untuk mengelola arsip, salah satunya oleh lingkungan pengadilan.

Dalam Pasal 7 ayat (3) yang menyatakan bahwa setiap Badan Publik wajib membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga layanan informasi dapat memberikan akses dengan mudah, maka Badan Publik perlu mengelola informasi dan dokumentasi yang bisa menjamin penyediaan informasi yang mudah, cermat, cepat dan akurat. Bagi Mahkamah Agung, transparansi atau keterbukaan peradilan saat ini bukan hanya menjadi kebutuhan publik, namun juga kebutuhan seluruh warga badan peradilan. Akan terjadi penguatan akuntabilitas, profesionalisme serta integritas warga peradilan

secara perlahan dengan adanya transparansi peradilan. Keterbukaan informasi yang efektif dan efisien adalah sebuah bagian dari komitmen Mahkamah Agung dalam rangka reformasi birokrasi, bahkan jauh sebelum Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik, Mahkamah Agung sudah terlebih dahulu merealisasikannya, hal ini sebagaimana yang tertuang. Pengadilan Negeri sebagai ujung tombak penyelenggaraan peradilan harus memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Implementasi SIIP di Pengadilan Negeri dapat membantu meningkatkan efisiensi dan transparansi peradilan. Implementasi SIIP memberikan beberapa manfaat, antara lain: meningkatkan efisiensi proses peradilan, transparansi dan akuntabilitas, memperbaiki kualitas pelayanan, mengurangi biaya operasional dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

## B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam artikel ini menggunakan metode penelitian normatif, penelitian normatif adalah jenis penelitian yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum tertulis serta prinsip-prinsip hukum yang relevan dengan topik peraturan perundang-undangan dan konsep hukum terkait SIIP. Dan Dengan sumber Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang kehakiman.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagaimana SIIP mempengaruhi transparansi dalam penyelenggaraan peradilan di PN Lbb?

Sistem Informasi Penyelenggaraan Peradilan mempengaruhi transparansi dalam penyelenggaraan peradilan melalui beberapa fungsi. Pertama, SIIP memungkinkan masyarakat mengakses informasi perkara secara online, termasuk status perkara, jadwal sidang, dan putusan pengadilan. Kedua, SIIP memungkinkan pengumuman putusan pengadilan secara online, sehingga masyarakat dapat mengetahui hasil perkara dengan mudah. Ketiga, SIIP memungkinkan masyarakat memantau proses peradilan secara online, sehingga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

SIIP (Sistem Informasi Instansi Peradilan) adalah sebuah sistem elektronik yang digunakan untuk mendukung transparansi dan efisiensi dalam penyelenggaraan peradilan di Indonesia, termasuk di Pengadilan Negeri (PN) Lembaga Peradilan. Secara umum, SIIP berfungsi untuk mengelola dan mendokumentasikan informasi terkait perkara, mulai dari pendaftaran, jadwal sidang, hingga putusan. SIIP dapat mempengaruhi transparansi dalam berbagai aspek, di antaranya:

#### 1.1 Kemudahan Akses Informasi

SIIP memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi mengenai perkara yang sedang diproses di pengadilan. Hal ini meningkatkan transparansi karena pihak terkait (seperti pihak berperkara, kuasa hukum, hingga masyarakat umum) dapat mengetahui status suatu perkara secara langsung tanpa harus datang ke pengadilan. Informasi yang bisa diakses mencakup: Jadwal persidangan, Status perkara, Putusan yang sudah dijatuhkan, Daftar perkara.

#### 1.2 Pengurangan Potensi Penyalahgunaan

Dengan adanya sistem yang terdigitalisasi, SIIP mengurangi kemungkinan manipulasi atau penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Setiap perubahan yang terjadi dalam proses peradilan tercatat dengan jelas, membuat pengawasan lebih mudah dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang seperti pengawas peradilan atau publik.

#### 1.3 Peningkatan Akuntabilitas

SIIP mendorong pengadilan untuk lebih akuntabel dalam menjalankan tugasnya. Dengan adanya pencatatan yang sistematis dan terstruktur mengenai jalannya persidangan, keputusan hakim, dan administratif perkara, setiap langkah dalam proses peradilan bisa dipertanggungjawabkan. Pihak-pihak yang berkepentingan dapat memonitor jalannya perkara dan mendapatkan informasi terkait putusan dengan mudah.

#### 1.4 Mempermudah Pengawasan oleh Masyarakat

Masyarakat dan lembaga terkait dapat melakukan pengawasan terhadap jalannya perkara di pengadilan. Transparansi dalam proses peradilan memberi

kesempatan bagi masyarakat atau pengadilan tinggi untuk melihat dan menilai apakah prosedur peradilan dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku atau tidak.

### 1.5 Meningkatkan Efisiensi Proses Peradilan

Dengan adanya SIIP, proses pengelolaan data perkara menjadi lebih efisien dan terstruktur. Hal ini juga mempengaruhi kecepatan dan kelancaran proses peradilan, karena informasi dapat diakses secara real-time oleh pihak yang berwenang dan tidak perlu lagi mengandalkan pencatatan manual yang berpotensi memakan waktu lebih lama. Efisiensi ini berkontribusi pada pelayanan publik yang lebih baik dan lebih transparan.

2. Apa dampak siip terhadap peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan peradilan ?

#### 2.1 Peningkatan Efisiensi dalam Pengelolaan Perkara.

SIIP mengintegrasikan semua data terkait perkara, seperti pendaftaran, persidangan, putusan, dan pelaksanaan putusan, sehingga mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk mencari dan memverifikasi data yang sebelumnya harus dilakukan secara manual. Beberapa efek utama yang berkaitan dengan efisiensi adalah: Pengelolaan Berkas Elektronik Pencarian, pemrosesan, dan pengarsipan menjadi lebih mudah dengan berkas perkara yang disimpan dalam format elektronik.

#### 2.2 Peningkatan Efisiensi dalam Pengelolaan Perkara.

SIIP mengintegrasikan semua data terkait perkara, seperti pendaftaran, persidangan, putusan, dan pelaksanaan putusan, sehingga mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk mencari dan memverifikasi data yang sebelumnya harus dilakukan secara manual. Beberapa efek utama yang berkaitan dengan efisiensi adalah Pengelolaan Berkas Elektronik: Pencarian, pemrosesan, dan pengarsipan menjadi lebih mudah dengan berkas perkara yang disimpan dalam format elektronik.

#### 2.3 Peningkatan Akuntabilitas dan Pengawasan.

Dengan SIIP, pengadilan dapat lebih mudah mengawasi jalannya perkara dan memastikan bahwa prosedur peradilan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### 2.3.1 Laporan dan Monitoring

Fitur laporan dan monitoring dalam SIIP memungkinkan pengadilan untuk memantau perkembangan perkara secara real-time dan mengidentifikasi hambatan atau penundaan dalam proses peradilan.

2.3.2 Peningkatan Pengawasan dari Pengadilan Tinggi Pengadilan Tinggi dapat lebih mudah melakukan evaluasi terhadap kinerja Pengadilan Negeri (PN) di bawahnya.

### 3. Apa saja hambatan dalam pelaksanaan siip Pengadilan Negri Lubuk Basung?

Meskipun ada banyak keuntungan dari pelaksanaan Sistem Informasi Instansi Peradilan (SIIP) di pengadilan di Indonesia, ada beberapa hambatan yang perlu diperhatikan. Hambatan-hambatan ini dapat memengaruhi seberapa efektif dan efisien SIIP dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan layanan publik di peradilan. Berikut adalah beberapa tantangan utama yang sering dihadapi saat menjalankan SIIP:

#### 3.1 Keterbatasan Infrastruktur Teknologi

Beberapa pengadilan memiliki keterbatasan infrastruktur teknologi, terutama di daerah terpencil. Ini merupakan salah satu hambatan terbesar bagi pelaksanaan SIIP. Banyak pengadilan tidak memiliki perangkat keras yang diperlukan untuk menjalankan SIIP dengan baik dan koneksi internet yang stabil. Hal ini menyebabkan proses implementasi dan akses ke data yang diperlukan menjadi lebih lama. Selain itu, keterbatasan ini dapat menyebabkan perbedaan kualitas layanan antara pengadilan kota dan pengadilan daerah. Digitalisasi dan integrasi sistem di seluruh negara terhambat oleh keterbatasan.

#### 3.2 Kurangnya Sumber Daya Manusia yang Terlatih

Sumber daya manusia yang terlatih dalam menggunakan SIIP juga menjadi tantangan. Banyak pegawai pengadilan yang tidak memiliki keterampilan teknologi yang memadai untuk mengoperasikan sistem dengan baik. Pelatihan yang tidak memadai atau kurangnya pemahaman tentang sistem ini bisa menghambat pelaksanaan dan membuat proses yang seharusnya lebih efisien malah lebih lambat. Selain itu, peralihan dari sistem manual ke sistem berbasis teknologi sering kali dihadapkan pada

resistensi dari pegawai yang lebih terbiasa dengan cara lama, sehingga memperlambat adopsi teknologi.

### 3.3 Masalah Keamanan dan Kerahasiaan Data

Pelaksanaan SIIP menuntut pengelolaan data yang sangat besar dan sensitif. Salah satu hambatan utama yang dihadapi adalah masalah keamanan dan kerahasiaan data. Data yang ada dalam SIIP sering kali mencakup informasi pribadi dan rahasia, yang dapat rentan terhadap kebocoran atau serangan siber jika tidak dilindungi dengan sistem keamanan yang memadai. Meskipun telah dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkan sistem keamanan, pengadilan masih harus mengatasi tantangan ini untuk memastikan bahwa data perkara dan data pribadi pihak-pihak yang terlibat tidak jatuh ke tangan yang salah.

### 3.4 Masalah Integrasi Sistem Antar Pengadilan

Integrasi antara SIIP dengan sistem lainnya di tingkat yang lebih tinggi, seperti di Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung, sering kali menemui kendala. Pengadilan Negeri seringkali harus beradaptasi dengan sistem yang berbeda atau versi yang tidak kompatibel dengan sistem yang digunakan di tingkat atas. Hal ini menyulitkan untuk berbagi informasi secara efisien dan memperlambat alur pengolahan data perkara yang lebih cepat dan akurat. Integrasi yang buruk ini juga menghambat upaya pengawasan dan pengendalian kualitas yang optimal oleh lembaga peradilan di tingkat pusat.

### 3.5 Anggaran dan Pembiayaan

Anggaran yang terbatas menjadi salah satu hambatan yang signifikan dalam pelaksanaan SIIP. Meskipun SIIP bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi, implementasinya membutuhkan investasi yang besar untuk pembaruan perangkat keras, perangkat lunak, dan pelatihan sumber daya manusia. Beberapa pengadilan, terutama yang berada di daerah dengan anggaran terbatas, kesulitan untuk mengalokasikan dana yang cukup untuk memastikan keberlanjutan sistem dan memperbarui teknologi yang sudah usang. Tanpa anggaran yang memadai, pengadilan akan kesulitan dalam memelihara sistem dan menghadapi tantangan yang ada.

### C. PENUTUP

Sistem Informasi Instansi Peradilan (SIIP) sangat penting untuk meningkatkan sistem peradilan yang adil, transparan, dan akuntabel, terutama di Pengadilan Negeri Lubuk Basung (PN LBB). SIIP telah memungkinkan pemantauan dan pengawasan yang lebih mudah, serta mempercepat proses administrasi pengadilan. Sistem ini sangat penting untuk meningkatkan transparansi karena memungkinkan semua orang, termasuk masyarakat, kuasa hukum, dan pihak berperkara, untuk mengakses informasi terkait kasus secara real-time tanpa harus pergi ke pengadilan. Pengadilan lebih dapat dipertanggungjawabkan atas setiap keputusan dan proses yang dilakukan dengan SIIP. Pemantauan perkara yang lebih baik juga memungkinkan pengadilan untuk memperbaiki kesalahan dan meningkatkan layanan. SIIP meningkatkan akuntabilitas internal pengadilan selain pengawasan eksternal. Semua operasi administrasi, seperti pencatatan data perkara, penjadwalan sidang, dan pengambilan keputusan, dicatat secara elektronik. Ini membuat proses lebih jelas dan efektif.

Dimungkinkan untuk mengurangi kemungkinan penyalahgunaan wewenang atau pengaruh luar dalam proses peradilan dengan memantau setiap perubahan dalam sistem. Selain itu, SIIP memudahkan pimpinan pengadilan untuk melacak kinerja dan perkembangan setiap kasus dengan lebih mudah dan efisien, memungkinkan mereka untuk melakukan perbaikan jika diperlukan. Namun demikian, masalah infrastruktur teknologi, pelatihan SDM, dan keamanan data harus diatasi untuk SIIP yang optimal. Meskipun SIIP menawarkan banyak potensi.

#### DAFTAR PUSTAKA / DAFTAR REFERENSI

Buku:

Mahkamah Agung RI. (2020). Sistem Informasi Penyelenggaraan Peradilan. Jakarta: Mahkamah Agung RI, hlm. 12-15.

System informasi penyelenggaraan peradilan"Mahkamah Agung RI, 2022)

Universitas Indonesia. (2019). Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas Penyelenggaraan Peradilan. Jakarta: Universitas Indonesia, hlm. 25-30.

Jurnal:

Jurnal Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI, 2022

“Peningkatan efektivitas penyelenggaraan peradilan” oleh universitas Indonesia (2019)

Peraturan Perundang-Undangan:

Penyelesaian Kasus, Pasal 10.

Peraturan undan-undang Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2019 tentang Prosedur Penyelesaian Kasus.

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.